



LURAH PATALAN  
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN PATALAN

NOMOR 7 TAHUN 2021  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH PATALAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja

- Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota Dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718);
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

- Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1633);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 961);
  14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
  15. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);
  16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 33);
  17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
  18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
  19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);

20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Urusan Keistimewaan di Kalurahan/Kelurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 32);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 104);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 42)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 55);
27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
  28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 05);
  29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
  30. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
  31. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);
  32. Peraturan Bupati Bantul Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Berisifat Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Berisifat Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 42);
  33. Peraturan Desa Patalan Nomor 07 Tahun 2019 tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa Patalan Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Patalan Tahun 2019 Nomor 07);
34. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Patalan (Lembaran Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 9);
  35. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Patalan (Lembaran Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 10);
  36. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 11);
  37. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Patalan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PATALAN**

dan

**LURAH PATALAN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN PATALAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp.	4.853.004.183,00
2. Belanja Kalurahan	Rp.	5.002.266.879,56
Surplus/(Defisit)	Rp.	(149.262.696,56)
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	159.262.696,56
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	10.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	149.262.696,56

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan tak bagian terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APB Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal;
- c. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya;

## Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APB Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan;

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pengesaran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Patalan.

Ditetapkan di Patalan  
pada tanggal, 31 Desember 2021  
LURAH PATALAN

Ttd.

SAYUDI

Diundangkan di Patalan  
pada tanggal, 31 Desember 2021  
CARIK PATALAN,

Ttd.

EFFENDI DHARMAWAN PRASETIO

LEMBARAN KALURAHAN PATALAN TAHUN 2021 NOMOR 7  
NOREG. PERATURAN KALURAHAN PATALAN KAPANEWON JETIS,  
KABUPATEN BANTUL : (35/PATALAN/2021)

Salinan Sesuai dengan aslinya,

An. Carik Patalan  
Kepala Urusan Pangripta,



LAMPIRAN  
 PERATURAN KALURAHAN PATALAN  
 NOMOR 7 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN PATALAN  
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Kalurahan	322.267.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	4.519.237.183,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	11.500.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>4.853.004.183,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	1.265.221.550,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.996.648.829,56	
5.3.	Belanja Modal	188.396.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	552.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>5.002.266.879,56</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(149.262.696,56)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	159.262.696,56	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	159.262.696,56	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>149.262.696,56</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARA</b>	<b>0,00</b>	

PATALAN, 31 Desember 2021

LURAH

Ttd.

SAYUDI

Salinan Sesuai dengan aslinya,  
 An. Carik Patalan  
 Kepala Urusan Pangripta,



SALINAN

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
 DESA PEMERINTAH KALURAHAN PATALAN  
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Kalurahan	322.267.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	4.519.237.183,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	11.500.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>4.853.004.183,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN KALURAHAN</u></b>	<b><u>2.253.936.084,56</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan (Maksimal 30% untuk</b>	<b>1.881.152.084,56</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	57.822.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	57.822.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan	885.201.600,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	885.201.600,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan	46.267.200,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	46.267.200,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPKK dan P PKK, Perlengkapan Perkantoran, pa	552.408.034,56	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	552.408.034,56	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL)	123.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	123.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkan	9.905.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.605.000,00	
1.1.06	5.3.	Belanja Modal	300.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	53.617.500,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.617.500,00	
1.1.90		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal	1.972.800,00	ADD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	1.972.800,00	
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal	112.925.300,00	PBH
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	112.925.300,00	
1.1.93		Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah,Pamong Kalurahan dan Bamuskal	33.105.000,00	PBH
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	33.105.000,00	
1.1.94		Penyediaan Tambahan Penghasilan Dari Tanah Pelungguh	4.927.650,00	PAD

SALINAN

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Kalurahan</b>	<b>119.235.000,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	35.035.000,00	PAD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	35.035.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	21.200.000,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.200.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa ( Dipilih)	63.000.000,00	PBP
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	63.000.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>20.449.000,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.110.000,00	PAD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.110.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	7.622.000,00	DDS, PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.622.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	3.049.000,00	PAD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.989.000,00	
1.3.03	5.3.	Belanja Modal	60.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	7.668.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.668.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>175.340.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes ( Reguler)	16.329.500,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.329.500,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	31.920.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.920.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	8.320.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.320.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	10.935.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.935.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	7.000.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	6.077.500,00	DDS
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.077.500,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	4.250.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.250.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	39.275.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.275.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	6.670.000,00	DDS
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.670.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih	44.563.000,00	PAD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.563.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>57.760.000,00</b>	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	8.195.000,00	PAD
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.195.000,00	
1.5.04		Mediasi Konflik Pertanahan	20.285.000,00	PAD
1.5.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.285.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	29.280.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.280.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN</u></b>	<b><u>1.689.155.000,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>147.378.500,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	29.595.500,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.595.500,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	89.408.000,00	PBK
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.408.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	6.712.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.712.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	21.663.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.663.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>447.404.500,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	58.197.500,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.197.500,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	363.770.000,00	PBK
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	363.770.000,00	
2.2.91		Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	19.719.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.719.000,00	
2.2.96		Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DII)	5.718.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.718.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>874.510.000,00</b>	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Kalurahan	454.780.000,00	DDS, PBK
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	454.780.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	227.485.000,00	PBK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	227.485.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong, selokan dll)	192.245.000,00	PBK
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	192.245.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>67.890.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	18.945.000,00	PAD
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.945.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	48.945.000,00	DDS
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	818.500,00	
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	48.126.500,00	
<b>2.5.</b>		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>108.725.000,00</b>	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Kalurahan	102.092.000,00	PBK
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	102.092.000,00	
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan (Dipilih)	6.633.000,00	PBK
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.633.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>18.367.000,00</b>	
2.6.06		Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	18.367.000,00	PBK
2.6.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.367.000,00	
<b>2.8.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>24.880.000,00</b>	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan	24.880.000,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.880.000,00	
<b>3</b>		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>208.478.300,00</b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>140.388.000,00</b>	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Kalurahan	24.978.000,00	DDS
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.978.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kalurahan	11.400.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	
3.1.94		Penguatan Desa Aman Covid-19/Desa Tangguh Bencana	104.010.000,00	DDS
3.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.135.000,00	
3.1.94	5.3.	Belanja Modal	31.875.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>56.515.300,00</b>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan	520.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	520.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Kalurahan tkt . Kapanewon/Kab/Kot)	4.239.000,00	DDS
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.239.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	27.118.300,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.118.300,00	
3.2.90		Pembinaan Bidang Keagamaan	24.638.000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.638.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>6.545.000,00</b>	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan	6.545.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.545.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>5.030.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKM Kalurahan/LPM/LPM Kalurahan	1.720.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.720.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	3.310.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.310.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>298.697.495,00</u></b>	
<b>4.1.</b>		<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>	<b>5.010.000,00</b>	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	5.010.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.010.000,00	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>244.871.700,00</b>	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	24.815.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.815.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	37.025.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.025.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	19.390.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.390.000,00	
4.2.90		Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan	156.641.700,00	DDS
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	156.641.700,00	
4.2.92		Pengembangan Usaha Hasil Pertanian/Peternakan	7.000.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>33.865.500,00</b>	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Lurah	10.000.000,00	PAD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan	20.832.500,00	PAD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.832.500,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BAMUSKAL	3.033.000,00	PAD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.033.000,00	
<b>4.7.</b>		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>14.950.295,00</b>	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Kalurahan/Kios Milik Kalurahan	14.950.295,00	DDS
4.7.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.950.295,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK K</u></b>	<b><u>552.000.000,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>5.000.000,00</b>	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	PAD
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
<b>5.2.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>5.000.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000,00	PAD
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>542.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	5.000.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.01		Bantuan Langsung Tunai (BLT)	522.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	522.000.000,00	
5.3.02		Bantuan Bahan Pangan	5.000.000,00	PAD
5.3.02	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.03		Bantuan Pendidikan	5.000.000,00	PAD
5.3.03	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.04		Bantuan Pengobatan	5.000.000,00	PAD
5.3.04	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>5.002.266.879,56</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(149.262.696,56)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	159.262.696,56	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>149.262.696,56</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARA</b>	<b>0,00</b>	

PATALAN, 31 Desember 2021

LURAH

Ttd.

SAYUDI

Salinan Sesuai dengan aslinya,  
An. Carik Patalan  
Kepala Urusan Pangripta,

